**PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
BERDASARKAN REFORMASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TAHUN 2024**

Oleh:

Dara Lativa Kalsum Nova daralatifalatifa@gmail.com

Kesi Aprianti Putri kesiapriantiputri24@gmail.com

Nasrullah lah900653@gmail.com

Viranti Panca Nisa virantipancanisa@gmail.com

HELDA RAHMASARI, S.H.,M.H

heldarahmasari@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2024 dalam konteks penegakan hukum acara pidana di Indonesia, dengan fokus pada penerapan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap pasal-pasal yang terkandung dalam KUHP 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi KUHP 2024 membawa perubahan signifikan, seperti penerapan Pasal 52 tentang pemidanaan yang memperhatikan martabat manusia, Pasal 258 ayat (1) yang mengatur perlindungan privasi digital, dan Pasal 143 ayat (2) yang menekankan kejelasan dalam penyusunan dakwaan. Selain itu, prinsip retroaktif pada kasus-kasus tertentu menunjukkan upaya Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional dalam penegakan hukum. Meski demikian, tantangan terbesar terletak pada implementasi reformasi ini, termasuk perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, modernisasi infrastruktur hukum, dan penanganan kejahatan korupsi.

Kata kunci : KUHP Baru, Reformasi, KUHP, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the reform of the Criminal Code (KUHP) 2024 in the context of criminal procedure law enforcement in Indonesia, with a focus on the application of the principles of justice, human rights, and adaptation to the times, as well as the challenges faced in its implementation. This research uses a normative approach by analyzing the articles contained in the 2024 Criminal Code. The results show that the reform of the 2024 Criminal Code brings significant changes, such as the application of Article 52 on punishment that takes into account human dignity, Article 258 paragraph (1) which regulates the protection of digital privacy, and Article 143 paragraph (2) which emphasizes clarity in the preparation of indictments. In addition, the principle of retroactivity in certain cases shows Indonesia's efforts to conform to international standards in law enforcement. However, the biggest challenge lies in the implementation of these reforms, including the need to increase the capacity of law enforcement officers, modernize legal infrastructure, and address corruption crimes.

Keywords: *New Criminal Code, Reform, KUHP, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Reformasi hukum acara pidana dan penegakan hukum pidana di Indonesia telah menjadi isu krusial dalam upaya memperbaiki sistem peradilan pidana dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan-tantangan baru di bidang hukum serta tuntutan yang semakin tinggi akan keadilan mendorong perlunya perubahan dan perbaikan dalam hukum acara pidana dan penegakan hukum pidana. Kedua aspek ini merupakan pilar

utama dalam menjamin keadilan bagi masyarakat Indonesia, sehingga pembaruan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.¹

Sistem hukum acara pidana di Indonesia telah mengalami beberapa revisi dan pembaruan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, sebagai negara dengan populasi besar dan beragam, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam penegakan hukum pidana dan pemberantasan kejahatan. Hukum acara pidana berperan sebagai instrumen hukum yang mengatur proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, masih terdapat sejumlah masalah sistemik dan praktik yang kurang efisien yang menghambat efektivitas penegakan hukum pidana.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah lambannya proses peradilan. Proses yang panjang ini tidak hanya mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, tetapi juga dapat mengakibatkan hilangnya bukti, mengganggu hak-hak terdakwa dan korban, serta menurunkan efektivitas hukum sebagai alat perbaikan sosial. Ketidakadilan ini menimbulkan kesenjangan dalam akses keadilan, di mana terdakwa dengan sumber daya finansial yang memadai dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum berkualitas, sementara yang kurang mampu sulit untuk membela hak-haknya secara memadai.

Korupsi juga menjadi masalah kronis yang menghambat perkembangan sistem peradilan pidana yang dapat diandalkan di Indonesia. Praktik-praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan birokrasi peradilan menggerogoti independensi dan kredibilitas institusi-institusi tersebut. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum menurun, yang selanjutnya menghambat penegakan hukum yang efektif dan adil. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas dalam reformasi hukum acara pidana dan sistem peradilan di Indonesia.

¹ Marbun, R., Mulyadi, M., & Rosalina, F. (2021). Hukum acara pidana: landasan filosofis, teoretis, dan konseptual. Publica Indonesia Utama. Hlm 87

Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga kerap menyebabkan tumpang tindih dan kebingungan dalam menangani kasus pidana yang kompleks. Situasi ini sering kali memperlambat proses penyelesaian kasus dan mengurangi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Peningkatan sinergi antar lembaga penegak hukum sangat penting untuk memastikan penanganan kasus berjalan efisien dan efektif. Tanpa koordinasi yang baik, reformasi hukum acara pidana hanya akan menjadi upaya setengah hati yang tidak memberikan perubahan signifikan.²

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana Indonesia adalah penanganan kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia, narkoba, dan kejahatan siber. Di era globalisasi, dunia yang semakin terhubung menuntut adanya kerja sama erat antarnegara untuk menghadapi tantangan ini. Harmonisasi hukum acara pidana internasional menjadi hal yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana di tingkat global. Indonesia perlu berpartisipasi aktif dalam kerja sama internasional agar mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perubahan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana dan penegakan hukum di Indonesia. Reformasi hukum acara pidana harus mampu mengatasi tantangan-tantangan yang ada, termasuk mempercepat proses peradilan, meningkatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta memastikan independensi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Dengan melakukan reformasi yang tepat, Indonesia diharapkan dapat membangun sistem peradilan yang lebih efisien dan terpercaya.

Selain itu, penguatan kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam menghadapi kejahatan transnasional. Upaya Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam memerangi kejahatan lintas batas perlu terus didorong dan diperkuat. Pendekatan kolaboratif dalam penegakan hukum

² Didik, K. (2023). Reformulasi Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis). Refika Aditama, Bandung, 2019, Hlm 89

akan membantu Indonesia mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menangani kejahatan yang bersifat global, sekaligus memperkuat posisi negara dalam komunitas internasional.³

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya reformasi hukum acara pidana di Indonesia sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses peradilan dalam mencapai keadilan yang lebih cepat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu memperbaiki sistem yang ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

PEMBAHASAN

A. Pembahasan tentang Upaya Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia

Upaya reformasi hukum acara pidana di Indonesia merupakan langkah penting yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses peradilan. Tujuan utama dari reformasi ini adalah agar keadilan dapat diakses dengan lebih cepat oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana. Reformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyederhanaan prosedur, penerapan teknologi informasi, hingga penguatan kerjasama antar lembaga penegak hukum. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia yang lebih optimal juga menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Reformasi hukum acara pidana ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan institusi peradilan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, akademisi, dan lembaga non-pemerintah agar tercipta sistem peradilan pidana yang lebih adil, efisien, dan berintegritas.⁴

Penyederhanaan prosedur hukum acara pidana menjadi langkah awal yang krusial dalam meningkatkan efektivitas proses peradilan. Saat ini, kompleksitas prosedur

³ Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304

⁴ Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149-160.

yang berbelit-belit seringkali menyebabkan penundaan dalam penyelesaian kasus pidana. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menyederhanakan dan mengkodifikasi hukum acara pidana agar lebih mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Penyederhanaan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kesalahan dan mengurangi potensi tumpang tindih wewenang antar lembaga penegak hukum. Perhatian khusus juga harus diberikan pada proses penyelidikan dan penuntutan yang merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana. Peningkatan efektivitas penyelidikan oleh polisi dan penuntutan oleh jaksa akan membantu mempercepat penanganan kasus.⁵

Penerapan teknologi informasi dalam proses peradilan juga menjadi salah satu opsi penting dalam upaya meningkatkan efisiensi hukum acara pidana. Sistem e-court dan e-filing, misalnya, telah menjadi langkah awal untuk mempercepat akses keadilan dan mendukung transparansi proses peradilan. Dengan adanya teknologi ini, pendaftaran perkara, pengumpulan bukti, dan proses persidangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap proses peradilan, sehingga kualitas dan keterbukaan proses peradilan dapat terjamin.

Kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi proses peradilan. Keberhasilan dalam penanganan kasus pidana tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi memerlukan sinergi antara polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Untuk itu, perlu adanya mekanisme koordinasi yang efektif, pertukaran informasi yang cepat, serta sinergi strategi antar lembaga agar proses peradilan dapat berjalan lebih cepat. Penguatan independensi dan akuntabilitas pejabat penegak hukum juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam reformasi ini.⁶

⁵ Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647

⁶ Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm 80

Menjaga independensi hakim, jaksa, dan polisi dari tekanan politik atau kepentingan pribadi diharapkan dapat memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara objektif dan adil. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal diperlukan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan hukum dan etika profesional. Perlindungan hak asasi manusia juga tidak boleh diabaikan dalam reformasi hukum acara pidana. Terdakwa, saksi, dan korban harus mendapatkan perlindungan yang memadai dan merasa aman dalam memberikan kesaksian dan pernyataan.

Pentingnya keseimbangan antara efisiensi proses dan perlindungan hak-hak para pihak menjadi prinsip yang harus dipegang teguh dalam setiap upaya reformasi. Langkah reformasi yang diambil tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Evaluasi terhadap sistem peradilan pidana yang ada saat ini juga harus dilakukan secara menyeluruh. Identifikasi terhadap kelemahan dan hambatan yang sering dihadapi dalam proses peradilan dapat membantu merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki efisiensi dan kecepatan proses peradilan.

Pendekatan berbasis bukti dan analisis data akan menjadi elemen penting dalam proses evaluasi ini. Reformasi hukum acara pidana juga harus mendorong penggunaan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan keadilan restoratif. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah dengan menemukan solusi bersama yang adil dan menguntungkan semua pihak. Dengan pendekatan alternatif ini, diharapkan lebih banyak kasus dapat diselesaikan di luar pengadilan, sehingga mengurangi beban kerja pengadilan dan mempercepat penyelesaian kasus.

Penguatan lembaga penegak hukum di tingkat lokal juga harus menjadi perhatian dalam reformasi hukum acara pidana. Reformasi ini harus melibatkan penguatan sistem peradilan pidana di tingkat lokal, termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum di daerah. Alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung sistem peradilan pidana di tingkat lokal juga penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Pendekatan

keadilan restoratif dan mediasi juga dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian kasus.⁷

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, mediasi dan keadilan restoratif dapat mencapai kesepakatan lebih cepat dibandingkan proses peradilan formal, sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Pentingnya kolaborasi internasional juga tidak boleh diabaikan dalam upaya reformasi hukum acara pidana. Indonesia harus aktif menjalin kerja sama dengan negara lain dalam penegakan hukum pidana, terutama yang terkait dengan penanganan kejahatan transnasional.

Pertukaran informasi dan intelijen, ekstradisi pelaku kejahatan, dan koordinasi dalam penegakan hukum antarnegara sangat penting dalam menghadapi tantangan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara. Perlindungan hak asasi manusia secara optimal juga harus menjadi pondasi utama dalam reformasi hukum acara pidana. Perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, saksi, dan korban harus dijamin pada setiap tahap proses peradilan. Perhatian khusus harus diberikan pada kondisi tahanan, pencegahan penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi dalam sistem peradilan pidana.⁸

Pendekatan berbasis ilmiah dan penggunaan data dalam proses penyelidikan dan penuntutan akan membantu mempercepat penanganan kasus dan meningkatkan akurasi keputusan hukum. Teknologi forensik, analisis kejahatan, dan profil pelaku kejahatan dapat membantu mengumpulkan bukti dan informasi dengan lebih akurat dan cepat, sehingga mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan. Penguatan kerjasama antara pemerintah, institusi peradilan, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan adil di Indonesia.

⁷ Budoyo, S., & Sari, R. K. (2019). Eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal MetaYuridis*, 2(2).

⁸ Dwiyantri, A., Megawati, L., Pujiningsih, D., Widaningsih, W., Girsang, H., Zamroni, M., ... & Phireri, P. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm 105

Penegakan hukum pidana di Indonesia menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang menghambat efektivitas sistem peradilan pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum pidana adalah adanya korupsi di dalam lembaga penegak hukum. Korupsi yang mengakar dapat merusak integritas dan independensi aparat penegak hukum serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Praktik korupsi seperti suap dan penyalahgunaan wewenang tidak hanya merusak kredibilitas lembaga, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum yang adil dan transparan. Menurut Bunga et al. (2019), langkah-langkah reformasi hukum yang serius diperlukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pemberantasan korupsi dalam lembaga penegak hukum.⁹

Untuk mengatasi korupsi yang telah mengakar ini, perlu diambil langkah-langkah yang mencakup peningkatan pengawasan internal dan eksternal terhadap perilaku aparat penegak hukum. Sistem pengawasan yang lebih ketat, seleksi transparan, serta pemberian insentif bagi aparat penegak hukum yang memiliki integritas tinggi dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi korupsi. Sebagaimana disampaikan oleh Mulyana (2017), penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi juga penting untuk memberikan efek jera. Reformasi hukum yang mencakup penguatan lembaga pengawas independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan badan pengawas internal di setiap institusi penegak hukum harus diperkuat untuk menghindari celah praktik korupsi.

Selain korupsi, salah satu hambatan signifikan lainnya dalam penegakan hukum pidana di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya. Kekurangan anggaran dan fasilitas, terutama di daerah-daerah terpencil, sering kali menghambat proses penyelidikan dan penuntutan perkara. Keterbatasan ini mencakup kurangnya peralatan forensik, kendaraan operasional, hingga minimnya jumlah personel yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang semakin kompleks. Dalam konteks

⁹ Yuliantini, N. P. R. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

reformasi hukum, pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk instansi penegak hukum, serta memastikan fasilitas yang diperlukan terpenuhi dengan baik.

Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan untuk menjamin distribusi sumber daya yang lebih merata. Pemerataan sumber daya ini sangat penting untuk mencegah adanya ketimpangan penegakan hukum antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang sering kali mengalami keterbatasan yang jauh lebih parah, yang berdampak pada akses masyarakat terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Langkah-langkah yang mendukung sinergi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di semua wilayah.¹⁰

Kapabilitas rendah dari aparat penegak hukum juga menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Banyak petugas hukum yang kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan yang memadai dalam menghadapi beragam bentuk kejahatan, terutama kejahatan yang memerlukan pemahaman mendalam seperti kejahatan siber dan tindak pidana ekonomi. Budiyantri dan Herlambang (2021) menyebutkan bahwa rendahnya kapasitas ini sering kali menyebabkan proses penanganan kasus berjalan lambat dan tidak optimal. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik, perlu ditingkatkan. Pelatihan ini harus mencakup pengetahuan teknis dan keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan dalam penegakan hukum modern yang semakin kompleks.

Reformasi hukum juga perlu memasukkan penyederhanaan dan kodifikasi hukum acara pidana. Proses peradilan yang panjang, berbelit-belit, dan terlalu formal sering kali menghambat kecepatan penanganan kasus dan mengurangi efektivitas penegakan hukum. Proses yang rumit ini tidak hanya membuat korban dan terdakwa merasa terjebak dalam birokrasi, tetapi juga memperpanjang

¹⁰ Wibowo, A. (2015). Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12(1), 1-19.

penyelesaian kasus yang seharusnya dapat ditangani lebih cepat. Dalam upaya memperbaiki situasi ini, hukum acara pidana perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk masyarakat umum.¹¹

Selain itu, pendekatan alternatif seperti mediasi dan keadilan restoratif dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara dengan lebih cepat dan adil. Penerapan pendekatan ini bertujuan untuk memberikan hasil yang menguntungkan semua pihak, terutama dalam kasus-kasus yang sifatnya tidak berat. Dengan adanya mediasi dan keadilan restoratif, pelaku dan korban dapat berdialog dan mencapai penyelesaian yang memuaskan, tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan penuh formalitas.

Akses yang tidak setara terhadap keadilan juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Kelompok masyarakat yang kurang mampu, minoritas, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses yang setara ke sistem peradilan pidana. Ketidakadilan ini muncul karena keterbatasan biaya, akses ke pengacara yang kompeten, dan kurangnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat tersebut. Syamsarina et al. (2022) menggarisbawahi bahwa reformasi hukum harus berfokus pada keadilan sosial dan inklusi, dengan memastikan adanya program bantuan hukum yang efektif dan inklusif bagi masyarakat kurang mampu.¹²

Program bantuan hukum harus diperkuat dan dijalankan secara efektif untuk memastikan bahwa hak-hak mereka yang kurang mampu terlindungi dengan baik. Prihardiati (2021) menegaskan pentingnya dukungan dana dan pelatihan untuk organisasi-organisasi bantuan hukum, agar dapat memberikan layanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Tanpa akses

¹¹ Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 247-262. 14 Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika

¹² Aprilianda, N., & Setyorini, E. H. (2012). Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak. *Risalah Hukum*, 36-45.

yang setara ke bantuan hukum, masyarakat rentan akan terus berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di hadapan hukum.¹³

Dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan ini, reformasi hukum acara pidana harus dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil mencakup memperkuat integritas dan independensi aparat penegak hukum dengan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan transparan. Shidarta (2013) menyebutkan bahwa peningkatan pengawasan ini harus disertai dengan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar, serta penghargaan bagi petugas yang menunjukkan integritas tinggi dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, peningkatan alokasi anggaran dan fasilitas bagi instansi penegak hukum, khususnya di daerah-daerah terpencil, sangat penting untuk memastikan pemerataan sumber daya. Pemerintah perlu menyadari bahwa penegakan hukum yang efektif tidak hanya memerlukan peraturan yang kuat, tetapi juga sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikannya dengan baik. Dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk anggaran dan kebijakan strategis perlu dikolaborasikan dengan upaya pemerintah daerah agar tercipta sistem penegakan hukum yang merata dan adil.

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum harus menjadi prioritas dalam reformasi hukum. Investasi dalam kapasitas ini penting untuk membekali aparat hukum dengan pengetahuan terkini dan keterampilan yang relevan untuk menangani kasus-kasus yang semakin kompleks. Febriana (2022) menyoroti bahwa pelatihan intensif bagi hakim, jaksa, dan penyidik tidak hanya meningkatkan kualitas penegakan hukum, tetapi juga mempercepat proses peradilan dengan hasil yang lebih akurat dan adil.¹⁴

Penyederhanaan hukum acara pidana juga harus menjadi fokus utama reformasi, agar proses hukum dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Hukum yang jelas dan

¹³ Wangol, W. A. (2016). Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 4(7).

¹⁴ Purwoleksono, D. E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press Hlm 87

mudah dipahami akan membantu mengurangi kebingungan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, sehingga mempercepat penyelesaian kasus dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi masyarakat. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dan pendekatan alternatif lainnya harus diperluas agar proses peradilan tidak selalu bergantung pada jalur formal.¹⁵

Keterlibatan masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam proses reformasi hukum perlu diperkuat agar terdapat representasi yang lebih luas dan partisipatif dalam setiap tahapan penegakan hukum. Partisipasi publik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan, serta membantu menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Pembahasan terhadap beberapa pasal dalam KUHP baru yang berkaitan dengan acara pidana di Indonesia menunjukkan upaya reformasi signifikan yang bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 52 yang menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Pasal ini menandai langkah penting dalam memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa atau terpidana harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Prinsip ini mengarahkan agar proses pemidanaan bukan hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk merehabilitasi pelaku agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara bermartabat. Pasal ini secara tidak langsung menyoroti perlunya reformasi dalam sistem pemasyarakatan, agar lembaga-lembaga penegakan hukum memperlakukan narapidana dengan pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan.¹⁶

Pasal 258 ayat (1) dalam KUHP baru memperkenalkan larangan keras terhadap tindakan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat,

¹⁵ Rustamaji, M. (2017). Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 1–17.

¹⁶ Rizky, A., & Nugraha, A. (2023). Kriminalisasi di luar KUHP dan implikasinya terhadap hukum acara pidana. *Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 1(1), 17-23. <https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh>

dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Pasal ini menunjukkan bagaimana hukum pidana di Indonesia merespons perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan perlindungan privasi di era digital. Dengan adanya pasal ini, hukum pidana mencakup tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas dan kerahasiaan data elektronik, serta menargetkan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan privasi individu. Hal ini menjadi krusial, terutama di tengah maraknya penyalahgunaan data pribadi dan ancaman kejahatan siber. Perumusan pasal ini diharapkan dapat menjadi pencegah bagi pelaku kejahatan siber serta mendorong masyarakat untuk lebih menghargai hak-hak privasi digital.

Pasal 143 ayat (2) menegaskan bahwa surat dakwaan harus memuat waktu dan tempat tindak pidana yang terjadi, serta harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan proses peradilan dengan memberikan kejelasan informasi mengenai dakwaan yang diajukan kepada terdakwa. Pasal ini menunjukkan reformasi dalam prosedur acara pidana, di mana perhatian terhadap detail dan kejelasan dalam surat dakwaan menjadi syarat mutlak untuk mencegah kekeliruan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penuntut umum. Surat dakwaan yang dirancang secara cermat dan jelas membantu menjamin hak-hak terdakwa untuk membela diri secara efektif dan memastikan bahwa proses pengadilan berjalan dengan transparan dan adil. Reformasi ini sangat penting untuk mengurangi potensi pelanggaran dalam penegakan hukum.¹⁷

Salah satu aspek penting dalam KUHP baru adalah prinsip retroaktif yang diatur dalam ketentuan bahwa hukum pidana dapat berlaku surut dalam kondisi tertentu. Hal ini mencerminkan penyesuaian terhadap konvensi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang mengakui bahwa ada keadaan-keadaan luar biasa di mana penerapan hukum secara retroaktif dibenarkan, misalnya dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat lainnya. Meskipun

¹⁷ Wijaya, I. K. G. (2017). Putusan Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. *Yuridika*, 32(1), 37. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4829>

prinsip non-retroaktif menjadi pedoman umum dalam hukum pidana untuk melindungi kepastian hukum, penerapan retroaktif dalam kasus khusus ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan serius tetap dapat diadili meskipun tindakan mereka dilakukan sebelum berlakunya ketentuan hukum baru.¹⁸

Dalam konteks ini, reformasi hukum pidana di Indonesia menunjukkan upaya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan standar internasional dan nilai-nilai universal hak asasi manusia. Adanya pasal-pasal ini memberikan bukti bahwa KUHP baru dirancang untuk menghadapi tantangan modern dalam penegakan hukum, seperti perlindungan data, transparansi dalam proses peradilan, dan prinsip-prinsip dasar keadilan yang lebih progresif. Reformasi ini diharapkan dapat menghilangkan celah hukum yang selama ini menghambat penegakan hukum yang adil dan setara bagi semua pihak.

Namun, tantangan dalam penerapan reformasi ini cukup signifikan. Misalnya, meskipun Pasal 52 mengatur bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia, implementasinya memerlukan perbaikan mendasar dalam sistem lembaga pemasyarakatan dan pelatihan aparat penegak hukum agar mampu melaksanakan hukum ini secara konsisten. Demikian pula, penerapan Pasal 258 ayat (1) membutuhkan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang memadai agar penegakan hukum terkait kejahatan siber dapat dilakukan secara efektif.

Lebih lanjut, Pasal 143 ayat (2) yang menekankan kejelasan dan ketelitian dalam penyusunan surat dakwaan memerlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan yang intensif bagi jaksa dan aparat penuntut umum agar dapat menyusun dakwaan yang memenuhi standar tersebut. Tanpa adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pasal-pasal ini berpotensi sulit untuk diimplementasikan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi KUHP tidak hanya memerlukan perubahan tekstual dalam undang-undang, tetapi juga komitmen untuk memperkuat sistem

¹⁸ Susila, J. (2019). Monodualistik penanganan tindak pidana pelecehan seksual perspektif pembaharuan hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2).

pendukung, termasuk pendidikan hukum dan alokasi anggaran yang cukup untuk lembaga peradilan.

Selain itu, penerapan hukum yang berlaku surut membutuhkan kajian mendalam dan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan politik atau kepentingan lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Prinsip ini harus diimplementasikan dengan hati-hati agar tidak melanggar hak-hak asasi terdakwa, namun tetap memberikan ruang bagi penegakan hukum atas kejahatan-kejahatan besar yang berdampak luas. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara legislator, penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pelaksanaan retroaktif dilakukan sesuai dengan tujuan utama yaitu keadilan yang berlandaskan hukum.¹⁹

Reformasi KUHP baru ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang selama ini ada dalam penegakan hukum di Indonesia, seperti penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya kejelasan hukum, dan keterbatasan dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks. Penerapan pasal-pasal baru ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana yang lebih adil, transparan, dan modern. Namun, tantangan untuk mengimplementasikan reformasi ini secara menyeluruh masih tetap ada, dan memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas.²⁰

Keseluruhan pasal-pasal dalam KUHP baru menunjukkan adanya tekad untuk menjadikan hukum pidana sebagai alat yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga proaktif dalam melindungi hak-hak warga negara dan menjaga keadilan sosial. Keberhasilan reformasi ini bergantung pada komitmen semua pihak untuk memastikan bahwa hukum yang telah diperbarui tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan dengan integritas dan profesionalisme di lapangan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sistem hukum

¹⁹ Eka Julianta Wahjoepramono, *Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik* (Karya Putra Darwati 2012). Hlm 301

²⁰ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Sinar Grafika 2009). Hlm 173

Indonesia untuk berkembang menuju keadilan yang lebih baik dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

PENUTUP

Reformasi KUHP 2024 membawa harapan baru bagi penegakan hukum acara pidana di Indonesia, dengan penekanan pada keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Namun, efektivitas reformasi ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang konsisten dan dukungan komprehensif dari seluruh elemen sistem peradilan, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah. Jika diterapkan dengan baik, reformasi ini dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk memastikan keberhasilan reformasi KUHP 2024 dalam penegakan hukum acara pidana, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, modernisasi infrastruktur hukum, dan peningkatan akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan internal dan eksternal guna mencegah praktik korupsi serta mendorong kerja sama antar lembaga penegak hukum agar proses hukum berjalan lebih efisien dan transparan.

REFERENSI

- Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aprilianda, N., & Setyorini, E. H. (2012). Pengaturan bantuan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam kerangka perlindungan anak. *Risalah Hukum*, 36-45.
- Budoyo, S., & Sari, R. K. (2019). Eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal MetaYuridis*, 2(2).

- Didik, K. (2023). Reformulasi kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagai pengendali perkara (Dominus Litis). Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Dwiyanti, A., Megawati, L., Pujiningsih, D., Widaningsih, W., Girsang, H., Zamroni, M., ... & Phireri, P. (2024). Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Eka Julianta Wahjoepramono. (2012). Konsekuensi hukum dalam profesi medik (Karya Putra Darwati).
- Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 247-262.
- M. Yahya Harahap. (2009). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP. Sinar Grafika.
- Marbun, R., Mulyadi, M., & Rosalina, F. (2021). Hukum acara pidana: landasan filosofis, teoretis, dan konseptual. Publica Indonesia Utama.
- Purwoleksono, D. E. (2015). Hukum Acara Pidana. Airlangga University Press.
- Rizky, A., & Nugraha, A. (2023). Kriminalisasi di luar KUHP dan implikasinya terhadap hukum acara pidana. *Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 1(1), 17-23. <https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh>
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.
- Rustamaji, M. (2017). Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Sinar Grafika.
- Susila, J. (2019). Monodualistik penanganan tindak pidana pelecehan seksual perspektif pembaharuan hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2).

- Wangol, W. A. (2016). Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*.
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304.
- Wijaya, I. K. G. (2017). Putusan Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. *Yuridika*, 32(1), 37. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4829>
- Yuliantini, N. P. R. (2015). Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).